

**ANALISIS DISPARITAS PENDAPATAN DAN POLA PERTUMBUHAN
EKONOMI DI PROVINSI ACEH
PERIODE 2002-2012**

(Indeks Williamson, Indeks Entropi Theil Dan Tipologi Klassen)

Asrita Zahara
STIE Lhokseumawe
Email: zaharaasrita@gmail.com

ABSTRACT

This research attempts to count disparity among of Regencies/Cities and to classify 23 the Regencies/Cities based on economics growth and GRDP per capita in Province of Aceh since 2002-2012. The data that used in this research consist of the GRDP at 2000 constant market price, economics growth and the number of population among of regencies/cities in Province of Aceh. Williamson Index, Entropy Theil Index and Klassen Typology, are tools of analysis.

The Williamson disparity index and the Entropy Theil Index of the GRDP per capita among Regencies/Cities in Province of Aceh pointed number 0,375 and 1,455 of the average, and the index shows a decreasive tendency. Based on Klassen Typology show that: Regencies Aceh Besar, Bireuen, Bener Meriah, Banda Aceh, Sabang and Lhokseumawe are classified as high growth and high income. Regencies Aceh Selatan, Aceh Barat, Nagan Raya and Langsa are classified as high income but low growth. Regencies Simeulu, Aceh Singkil, Aceh Tenggara, Aceh Tengah, Pidie, Pidie Jaya, and Gayo Lues are classified as high growth but low income. Regencies Aceh Timur, Aceh Utara, Aceh Barat Daya, Aceh Tamiang, Aceh Jaya, and Subulussalam are classified as low growth and low income.

Keywords: *Williamson Index, Entropy Theil Index, and Klassen Typology.*

A. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi diartikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat meningkat, dimana kenaikan pendapatan per kapita merupakan suatu pencerminan dari timbulnya perbaikan dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi harus dipandang sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas

struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional, di samping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan (Amalia, 2007:1).

Pembangunan daerah pada dasarnya merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Pembangunan yang dilaksanakan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai

tujuan pembangunan yang ingin dicapai, maka pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan merupakan tolak ukur keberhasilan pembangunan.

Indonesia terdiri dari berbagai pulau dengan bermacam karakteristik dan keragaman yang tinggi antar daerahnya. Keaneka ragaman tersebut meliputi sumber daya alam, letak geografis, ekonomi, sosial-budaya, adat-istiadat, jumlah penduduk, mutu sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana yang tersedia di setiap daerah. Hal tersebut akan berpengaruh pada kemampuan tumbuh dan berkembangnya suatu daerah yang tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan daerah lainnya, sehingga menimbulkan ketimpangan pendapatan antar wilayah.

Setiap wilayah mempunyai potensi untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisinya masing-masing. Kondisi-kondisi ini tidak sama diantara wilayah satu dengan lainnya, sehingga kecepatan pengembangan/pembangunan masing-masing wilayah tersebut tidak sama, atau dapat dikatakan pertumbuhan tidak berlangsung secara merata. Jika dilihat secara keseluruhan maka akan terjadi ketidak seimbangan atau disparitas diantara wilayah pertumbuhan. Fenomena ketidak seimbangan atau *imbalance*, dapat dirasakan dan diamati diantara wilayah-wilayah yang berbeda, sektor-sektor pembangunan, sektor-sektor perkotaan dan pedesaan serta diantara kelompok-kelompok masyarakat.

Menurut Myrdal, Arsyad dalam Kuncoro (2004:133) perbedaan tingkat kemajuan ekonomi antar daerah yang berlebihan akan menyebabkan

pengaruh yang merugikan (*backward effects*) mendominasi pengaruh yang menguntungkan (*spread effects*) terhadap pertumbuhan daerah, dalam hal ini mengakibatkan proses ketidak-seimbangan. Pelaku-pelaku yang mempunyai kekuatan pasar secara normal akan cenderung meningkat bukan menurun, sehingga mengakibatkan ketimpangan antar daerah.

Kuncoro (2004:21) upaya yang di lakukan oleh pemerintah untuk mengatasi ketimpangan regional adalah dengan memberlakukan dasar hukum desentralisasi yaitu Diterbitkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 mengenai Pemerintah daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 mengenai Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. UU No. 22 tahun 1999 mendelegasikan kekuasaan tertentu kepada pemerintah daerah dan membentuk proses politik daerah. Sedangkan UU No.25 tahun 1999 mendorong desentralisasi dengan memberikan pembagian sumber daya fiskal kepada pemerintah daerah.

Fenomena disparitas pendapatan hampir terjadi diseluruh daerah di Indonesia, termasuk Provinsi Aceh. Provinsi Aceh sebelumnya hanya terdiri dari 15 Kabupaten/Kota namun pada tahun 2002 ada 5 kabupaten yang melakukan pemekaran yaitu Nagan Raya, Aceh Jaya, Aceh Barat Daya, Gayo Lues, dan Aceh Tamiang. Kemudian tahun 2003 Bener Meriah memisahkan diri dari Aceh Tengah membentuk satu kabupaten baru, begitupula tepatnya pada tanggal 2 januari 2005 Subulussalam dan Pidie Jaya juga ikut melakukan pemekaran wilayah. Provinsi Aceh saat ini terdiri

dari 23 Kabupaten/Kota yakni 18 kabupaten dan 5 kota.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang diteliti oleh Sutawijaya, angka indeks Williamsons NAD tahun 2000-2006 masih menunjukkan angka yang tinggi yaitu masih diatas 1. Adanya Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah menjadikan provinsi Aceh mempunyai kewenangan yang lebih luas untuk mengelola potensi-potensi sumber daya alam yang ada dengan tepat dan optimal agar dapat mewujudkan kesejahteraan serta kemakmuran masyarakat secara adil dan merata, namun pada kenyataannya kesenjangan ekonomi masih jelas dirasakan di antar

daerah hingga pada tahun 2006 angka indeks masih tinggi. Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi yang menerima dana otonomi khusus di indonesia yang di keluarkan dalam UU nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh, adanya UU tersebut seharusnya menjadikan Provinsi Aceh lebih sejahtera karena selain memiliki kewenangan dalam mengelola potensi, Aceh juga memiliki sumber dana khusus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, akan tetapi indeks kemiskinan di Aceh tahun 2012 menduduki juara ketiga secara Nasional. Ketimpangan pendapatan sangat erat hubungannya dengan kemiskinan.

Tabel 1
PDRB Rata-rata Provinsi Aceh Atas Dasar Harga Konstan 2000
Tanpa Migas Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2002-2012
(Miliar Rupiah)

Kabupaten/Kota	Miliar Rupiah					
	2002	2007	Rata-rata 2002- 2007	2008	2012	Rata-rata 2008- 2012
Simeulue	159	213	178	232	288	259
Aceh Singkil	321	421	357	441	534	486
Aceh Selatan	949	1.181	1.057	1.224	1.421	1.311
Aceh Tenggara	336	655	457	678	832	751
Aceh Timur	1.244	1.491	1.357	1.529	1.759	1.641
Aceh Tengah	734	1.045	861	1.094	1.300	1.193
Aceh Barat	895	1.082	961	1.141	1.389	1.262
Aceh Besar	1.575	2.131	1.777	2.256	2.736	2.498
Pidie	1.026	1.502	1.213	1.570	1.873	1.719
Bireuen	1.642	2.259	1.866	2.386	2.940	2.651
Aceh Utara	2.183	2.544	2.306	2.637	3.064	2.839
Banda Aceh	1.313	2.585	1.740	2.731	3.441	3.071
Sabang	117	216	153	225	268	247
Langsa	633	781	705	811	973	891

Kabupaten/Kota	Miliar Rupiah					
	2002	2007	Rata-rata 2002- 2007	2008	2012	Rata-rata 2008- 2012
Lhokseumawe	1.336	1.852	1.519	1.970	2.441	2.203
Aceh Barat Daya	491	582	529	608	737	669
Gayo Lues	255	373	303	391	472	431
Aceh Tamiang	904	1.075	999	1.096	1.275	1.171
Nagan Raya	703	867	789	898	1.065	975
Aceh Jaya	301	243	271	253	300	276
Bener Meriah	-	660	618	686	837	759
Pidie Jaya	-	558	545	588	717	652
Subulussalam	-	226	223	237	293	263
Provinsi	17.117	24.542	20.778	25.682	30.955	28.219

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh

Berdasarkan tabel 1.1 rata-rata PDRB tahun 2002-2007 kabupaten yang memiliki PDRB yang paling besar adalah Aceh Utara dengan rata-rata Rp 2.306 milyar sedangkan yang paling kecil adalah kota Sabang yaitu Rp 153 milyar. Hal ini dikarenakan besarnya kontribusi sektor ekonomi terhadap PDRB di kabupaten Aceh Utara yaitu dari sektor Pertanian, dan sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran sedangkan kota sabang hanya dari sektor jasa. Kemudian rata-rata PDRB tahun 2008-2012 kota Banda Aceh memperoleh PDRB yang paling besar yaitu Rp 3.071 milyar begitu pula dengan kota Sabang juga memperoleh rata-rata PDRB yang paling kecil, yaitu Rp 247 milyar. Hal ini juga sebabkan karena peranan sektor ekonomi yang ada didaerah. Kota Banda Aceh mempunyai 3 sektor ekonomi yang selalu memberikan kontribusi sangat besar terhadap PDRB yaitu sektor jasa, Perdagangan, hotel, dan restoran dan sektor pengangkutan dan komunikasi,

dan cenderung meningkat dalam setiap tahunnya, sedangkan kota sabang hanya sektor jasa dan sektor Perdagangan, hotel, dan restoran yang selalu berkontribusi terhadap PDRB. Dari data ini menandakan bahwa masih tingginya disparitas pendapatan antar daerah di propinsi Aceh, disparitas tersebut terjadi karena perbedaan sumber daya manusia dan sumberdaya alam lainnya.

Perkembangan PDRB yang berbeda di setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh menyebabkan munculnya perbedaan pola dan struktur pertumbuhan ekonomi, sehingga adanya klasifikasi daerah yang maju dan daerah yang tertinggal.

Menurut Williamson dalam Emelia dan Imelia (2006:55) Alat analisis Tipologi wilayah digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah. Tipologi daerah pada dasarnya membagi daerah berdasarkan dua

indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan perkapita daerah. Dengan menentukan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebagai sumbu vertikal dan rata-rata pendapatan per kapita sebagai sumbu horizontal, daerah yang diamati dapat dibagi menjadi empat klasifikasi: daerah cepat maju dan cepat tumbuh, daerah maju tapi tertekan, daerah berkembang cepat, dan daerah yang relatif tertinggal.

Penelitian ini bertujuan: *pertama*, untuk mengetahui Berapa besar tingkat disparitas pendapatan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh yang di ukur dengan indeks Williamson dan indeks Entropi Theil. *Kedua*, untuk mengetahui bagaimana pola pertumbuhan ekonomi wilayah Kabupaten/ Kota di Provinsi Aceh menurut Tipologi Klassen.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Aceh yakni 23 Kabupaten/Kota yang terdiri dari 18 kabupaten dan 5 kota. Data yang digunakan berupa data skunder menurut runtut waktu (*times series*). Sumber data diperoleh langsung dari kantor BPS Bireuen dan BPS Provinsi Aceh. Adapun data yang digunakan berupa data PDRB provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, data penduduk provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, serta data laju pertumbuhan PDRB provinsi dan Kabupaten/Kota di Aceh.

Adapun analisis data yang digunakan penulis dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Indeks Ketimpangan Williamson

Ketimpangan pembangunan antara Kabupaten/Kota yang terjadi di Provinsi Aceh periode 2002-2012, dapat dianalisis dengan menggunakan Indeks Ketimpangan Regional (*Regional Inequality*) yang dinamakan dengan Indeks Ketimpangan Williamson. Dengan demikian, menurut Kuncoro (2004: 133) formulasi Indeks Williamson ini secara statistik dapat ditampilkan sebagai berikut:

$$IW = \frac{\sqrt{\sum(Y_i - Y)^2(f_i/n)}}{Y}$$

Keterangan:

- IW = Indeks Williamson
- Y_i = PDRB perkapita di Kabupaten/Kota i
- Y = PDRB perkapita di Provinsi Aceh
- f_i = Jumlah penduduk di Kabupaten/Kota i
- n = Jumlah penduduk di Provinsi Aceh

2. Indeks Entropi Theil

Menurut Ying dalam Kuncoro (2004:134) untuk mengukur ketimpangan regional bruto provinsi, Ying menggunakan Indeks Entropi Theil. Indeks Entropi Theil tersebut dapat dibagi/diurai menjadi dua sub indifikasi, yaitu ketimpangan dalam wilayah dan ketimpangan regional antar wilayah atau regional. Dengan menggunakan alat analisis Indeks Entropi Theil akan diketahui ada tidaknya ketimpangan yang terjadi di Provinsi Aceh. Rumus dari Indeks Entropi Theil adalah sebagai berikut:

$$I(y) = \sum (y_j / Y) \times \log [(y_j / Y) / (x_j / X)]$$

Dimana:

- $I(y)$ = Indeks Ketimpangan Entropi Theil
 y_j = PDRB per kapita Kabupaten/ Kota j
 Y = Rata-rata PDRB perkapita Provinsi Aceh
 x_j = Jumlah penduduk Kabupaten/ Kota j
 X = Jumlah penduduk Provinsi Aceh

3. Tipologi Klassen

Kuncoro (2004:118) alat analisis tipologi daerah digunakan untuk

mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah. Tipologi daerah pada dasarnya membagi daerah berdasarkan dua indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan per kapita daerah. Secara rinci dapat lihat pada tabel berikut:

Tabel 2
Tipologi Daerah

PDRB Perkapita (y)		
Laju Pertumbuhan (r)	$(y_i > y)$	$(y_i < y)$
$(r_i > r)$	Pendapatan Tinggi Dan Pertumbuhan Tinggi	Pendapatan Rendah Dan Pertumbuhan Tinggi
$(r_i < r)$	Pendapatan Tinggi Dan Pertumbuhan Rendah	Pendapatan Rendah Dan Pertumbuhan Rendah

Keterangan :

- r = Rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh.
 y = Rata-rata PDRB per kapita Provinsi Aceh.
 r_i = Pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota i .
 y_i = PDRB per kapita Kabupaten/ Kota i .

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Disparitas Pendapatan Wilayah

Ketimpangan (Disparitas) wilayah merupakan salah satu permasalahan pembangunan yang belum dapat dipecahkan khususnya pada negara-negara sedang berkembang. Ketimpangan wilayah ini terjadi dikarenakan perbedaan karakteristik antar daerah yang menyebabkan satu atau beberapa daerah lebih unggul atau maju dibandingkan daerah lainnya.

Besar kecilnya perbedaan PDRB per kapita antar Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh akan memberikan gambaran tentang perkembangan pembangunan di wilayah tersebut. Untuk memberikan gambaran yang lebih baik tentang kondisi dan perkembangan pembangunan daerah di wilayah Provinsi Aceh, dapat dianalisis melalui angka Indeks Ketimpangan Williamson dan Indeks Entropi Theil.

Tabel 3
Indeks Williamson Dan Indeks Entropi Theil
Provinsi Aceh Tahun 2002-2012

Tahun	Indeks Williamson	Indeks Entropi Theil
2002	0,333	1,426
2003	0,334	1,427
2004	0,376	1,432
2005	0,364	1,437
2006	0,340	1,465
2007	0,376	1,466
2008	0,393	1,469
2009	0,413	1,474
2010	0,397	1,469
2011	0,402	1,469
2012	0,401	1,468
Rata-rata	0,375	1,455

Sumber: Hasil Pengolahan Data, (Data Diolah, 2014)

Tabel 3 menunjukkan angka ketimpangan PDRB perkapita antar Kabupaten/ Kota di Provinsi Aceh selama periode tahun 2002-2012. Selama tahun pengamatan rata-rata indeks Williamson sebesar 0,375 dan rata-rata indeks Entropi Theil sebesar 1,455. Ketimpangan yang terjadi di Provinsi Aceh cenderung menurun dan masih tergolong sedang (rendah), namun trend ketimpangan cenderung berfluktuatif. Ketimpangan tertinggi terjadi pada tahun 2009 yaitu 0,413 berdasarkan indeks Williamson dan 1,474 berdasarkan indeks Entropi Theil,

sedangkan ketimpangan terendah terjadi pada tahun 2002 yaitu 0,333 berdasarkan indeks Williamson dan 1,426 berdasarkan indeks Entropi Theil.

Pada tahun 2002 ketimpangan yang terjadi berdasarkan indeks Williamson sebesar 0,333 sedangkan menurut indeks Entropi theil sebesar 1,426. Pada tahun 2003 nilai indeks Williamson sedikit meningkat menjadi 0,334 begitupula dengan indeks Entropi Theil meningkat menjadi 1,427. Pada tahun 2004 nilai indeks Williamson kembali meningkat menjadi 0,376 begitupula dengan nilai Indeks

Entropi Theil meningkat sebesar 1,432. Hal ini terjadi karena pada tahun 2004 Aceh dilanda Gempa dan Stunami sehingga perbedaan pendapatan per kapita begitu mencolok di antar daerah.

Pada tahun 2005 nilai indeks Williamson turun menjadi 0,364 berbeda dengan indeks Entropi Theil meningkat menjadi 1,437. Pada tahun 2006 nilai indeks Williamson turun kembali menjadi 0,340 dan indeks Entropi Theil terus meningkat menjadi 1,465. Kemudian pada tahun 2007 kedua nilai indeks kembali meningkat sebesar 0,376 dan 1,466, begitupun halnya di tahun 2008 nilai indeks terus meningkat menjadi 0,393 dan 1,474. Pada tahun 2005-2008 ini merupakan tahap-tahap awal pembangunan di Aceh setelah dilanda bencana alam yaitu Gempa dan Stunami sehingga angka ketimpangannya besar dikarenakan adanya Rekontruksi dan Rehabilitasi dari pemerintah pusat sehingga terkonsentrasinya kegiatan ekonomi pada suatu daerah dan besarnya alokasi dana pada daerah tertentu.

Pada tahun 2009 nilai indeks masih terus meningkat dan merupakan tahun ketimpangan tertinggi di Aceh selama tahun pengamatan dengan kedua nilai indeks 0,413 dan 1,474. Hal ini dikibatkan karena perbedaan potensi ekonomi, kebijakan pemerintah, ketersediaan sarana dan prasarana serta investasi menimbulkan perbedaan besaran PDRB antar kabupaten/kota di provinsi Aceh.

Pada tahun 2010 nilai indeks turun menjadi 0,397 dan 1,469, namun pada tahun 2011 nilai indeks sedikit meningkat menjadi 0,402 dan 1,469.

Kemudian pada tahun 2012 nilai indeks Williamson kembali menurun menjadi 0,401 dan indeks Entropi Theil menjadi 1,468. Hal ini menunjukkan bahwa disparitas pendapatan wilayah di provinsi Aceh mulai membaik.

Pada pertengahan tahun pengamatan yaitu 2005 dan 2006 angka indeks Williamson tidak searah dengan indeks Entropi Theil, ini sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Caska dan RM. Riadi yang meneliti di propinsi Riau dimana kedua nilai indeks ini memberikan hasil yang tidak searah. Fenomena ini sama halnya terjadi di provinsi Aceh, disebabkan karena adanya perubahan PDRB per kapita secara signifikan. Namun demikian secara umum indeks Williamson dan indeks Entropi Theil menunjukkan hasil yang searah meskipun dengan nilai indeks yang berbeda.

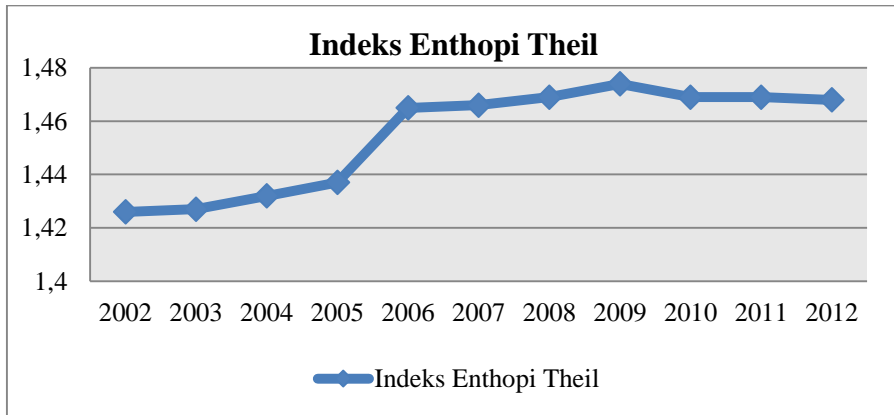
Menurut Hipotesis Neo-Klasik dalam Sjafrizal (2012:108) pada permulaan proses pembangunan suatu negara, ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung meningkat. Proses ini akan terjadi sampai ketimpangan tersebut mencapai titik puncak. Setelah itu bila proses pembangunan terus berlanjut maka secara beransur-ansur ketimpangan pembangunan antar wilayah tersebut akan menurun.

Ketimpangan yang terjadi di Provinsi Aceh selama tahun penelitian sejalan dengan teori Hipotesis Neo-Klasik yang dikutip dalam buku sjafrizal, dimana pada tahap awal penelitian ketimpangan yang terjadi cenderung meningkat hingga mencapai titik puncak tertinggi yaitu pada tahun 2009. Kemudian indeks ketimpangan

pada tahun-tahun berikutnya cenderung menurun secara beransur-ansur hingga pada tahun akhir penelitian.

Kecenderungan naik turunnya nilai indeks ketimpangan di Propinsi Aceh dapat kita lihat pada gambar 1 dan 2 yaitu sebagai berikut:

Gambar 1. Grafik Indeks Williamson Provinsi Aceh Tahun 2002-2012



Gambar 2. Grafik Indeks Williamson Provinsi Aceh Tahun 2002-2012

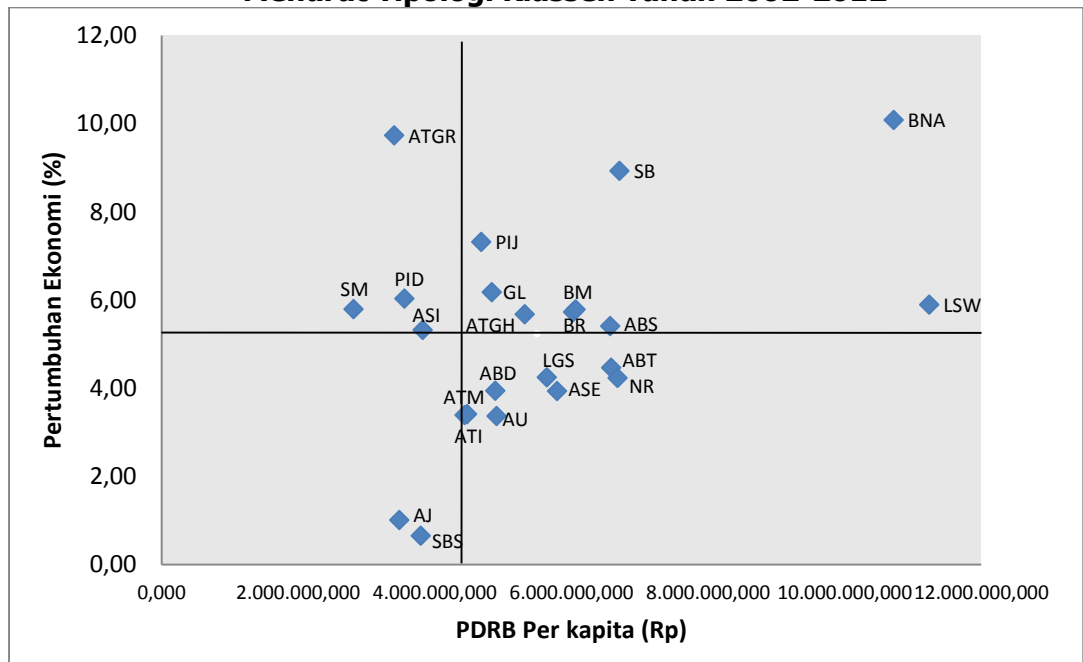
2. Analisis Pola Pertumbuhan Ekonomi Wilayah

Terkait dengan fenomena ketimpangan yang terjadi di Provinsi Aceh, Perkembangan PDRB yang berbeda di setiap Kabupaten/Kota juga dapat menyebabkan munculnya perbedaan pola dan struktur pertumbuhan ekonomi. Perbedaan pola dan struktur pertumbuhan

ekonomi dapat dihitung melalui metode *Klassen Tipologi*.

Kuncoro (2004:118) Tipologi daerah pada dasarnya membagi daerah berdasarkan dua indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan per kapita daerah. Berdasarkan hasil perhitungan Tipologi Klassen pengklasifikasian Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh menunjukkan hasil sebagai berikut:

Gambar 3
Pola Dan Struktur Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh
Menurut Tipologi Klassen Tahun 2002-2012



Keterangan

No	Simbol	Kabupaten	No	Simbol	Kabupaten
1	SM	Simeulue	13	SB	Sabang
2	ASI	Aceh Singkil	14	LGS	Langsa
3	ASE	Aceh Selatan	15	LSW	Lhokseumawe
4	ATGR	Aceh Tenggara	16	ABD	Aceh Barat Daya
5	ATI	Aceh Timur	17	GL	Gayo Lues
6	ATGH	Aceh Tengah	18	ATM	Aceh Tamiang
7	ABT	Aceh Barat	19	NR	Nagan Raya
8	ABS	Aceh Besar	20	AJ	Aceh Jaya
9	PID	Pidie	21	BM	Bener Meriah
10	BR	Bireuen	22	PIJ	Pidie Jaya
11	AU	Aceh Utara	23	SBS	Subulussalam
12	BNA	Banda Aceh			

Sumber: Hasil Pengolahan Data, (Data Diolah, 2014)

Berdasarkan gambar 4.4 dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Kuadran I

Kabupaten/Kota yang termasuk dalam klasifikasi ini adalah Kabupaten Aceh Besar, Bireuen, Bener Meriah,

Banda Aceh, Sabang dan Lhokseumawe. Daerah ini disebut juga sebagai daerah cepat maju dan cepat tumbuh karena memiliki Pendapatan tinggi dan pertumbuhan tinggi dibandingkan dengan Provinsi Aceh. Kabupaten/Kota yang masuk dalam kategori kuadran I ini pada umumnya daerah yang sudah maju baik dari segi pembangunan dan kecepatan pertumbuhan.

2. Kuadran II

Kabupaten/Kota yang masuk dalam klasifikasi ini adalah Kabupaten Aceh Selatan, Aceh Barat, Nagan Raya dan Langsa. Daerah ini disebut juga sebagai daerah maju tetapi tertekan karena memiliki pendapatan perkapita yang lebih tinggi akan tetapi pertumbuhan ekonominya rendah dibandingkan dengan Provinsi Aceh. PDRB yang tinggi tanpa dibarengi pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan menyebabkan perekonomian berjalan lambat yang pada akhirnya menurunkan kinerja ekonomi di daerah tersebut.

3. Kuadran III

Kabupaten/Kota yang masuk dalam klasifikasi ini adalah Kabupaten Simeulu, Aceh Singkil, Aceh Tenggara, Aceh Tengah, Pidie, Pidie Jaya, dan Gayo Lues. Daerah ini disebut juga daerah berkembang cepat karena memiliki pertumbuhan ekonomi lebih tinggi tetapi tingkat pendapatan perkapita lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Aceh. Hal ini mengindikasikan bahwa pendapatan Kabupaten tersebut masih relatif rendah dibandingkan dengan Kabupaten/ota yang lainnya, sehingga di masa yang akan datang harus terus dikembangkan

agar diperoleh pendapatan perkapita yang tidak relatif rendah.

4. Kuadran IV

Kabupaten/Kota yang masuk dalam klasifikasi ini adalah Kabupaten Aceh Timur, Aceh Utara, Aceh Barat Daya, Aceh Tamiang, Aceh Jaya, dan Subulussalam. Daerah ini disebut juga daerah relatif tertinggal karena memiliki tingkat pendapatan rendah dan pertumbuhan yang rendah dibandingkan dengan Provinsi Aceh.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka secara umum dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketimpangan yang terjadi antara Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh selama periode 2002-2012 dengan menggunakan indeks Williamson dan Entropi Theil cenderung menurun dengan nilai rata-rata indeks Williamson sebesar 0,375 dan rata-rata indeks Entropi Theil sebesar 1,455, tetapi trend ketimpangan cenderung berfluktuatif selama periode pengamatan.
2. Hasil analisis menurut *Klassen Typology* menunjukkan bahwa kabupaten Aceh Besar, Bireuen, Bener Meriah, Banda Aceh, Sabang dan Lhokseumawe merupakan daerah cepat maju dan cepat tumbuh. Kemudian kabupaten Aceh Selatan, Aceh Barat, Nagan Raya, dan Langsa merupakan daerah yang maju tapi tertekan. Kabupaten Simeulu, Aceh Singkil, Aceh Tenggara, Aceh Tengah, Pidie, Pidie Jaya, dan Gayo Lues merupakan

daerah yang berkembang cepat. Selanjutnya kabupaten, Aceh Timur, Aceh Utara, Aceh Barat Daya, Aceh Tamiang, Aceh Jaya, dan Subulussalam merupakan daerah yang relatif tertinggal diantara Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Aceh.

2. Saran

Terlepas dari berbagai kekurangan dalam penelitian ini, dimana penulis lebih mengandalkan data skunder dengan segala keterbatasannya, maka ada beberapa saran yang dapat disumbangkan untuk pemerintah Provinsi Aceh dalam meningkatkan pemerataan pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

1. Untuk memerangi disparitas pendapatan perkapita antar daerah di Provinsi Aceh, pemerintah Kabupaten/Kota diharapkan dapat menetapkan lebih lanjut sektor keunggulan yang dimiliki oleh masing-masing daerah, kemudian perlu difokuskan pengembangan sektor tersebut melalui kebijakan dan pengeluaran daerah.
2. Pemerintah daerah perlu menciptakan pemerataan lapangan kerja di daerah-daerah yang kurang berkembang untuk menghindari konsentrasi tenaga kerja yang terdidik (mempunyai skill) di satu daerah yang maju saja agar dapat meminimalkan daerah yang relatif tertinggal mengingat daerah-daerah tersebut mempunyai potensi ekonomi yang dapat dibanggakan.
3. Daerah yang termasuk dalam katagori maju dan cepat tumbuh diharapkan dapat mempertahankan posisinya agar tetap menjadi daerah maju.
4. Diharapkan bagi penelitian selajutnya untuk meneliti tingkat disparitas pendapatan didalam Kabupaten/Kota (within inequality) sehingga pemerintah lebih tepat sasaran dalam menentukan kebijakan pembangunan di Provinsi Aceh.

E. KEPUSTAKAAN

- Amalia, Lia. (2007). *Ekonomi Pembangunan*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh. (2011). *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Aceh Triwulan IV - 2011*. Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. Banda Aceh.
- Badan Pusat Statistik. (2012). *PDRB atas Dasar Harga Konstan 2000 Provinsi Aceh Berbagai Tahun Terbitan*. Aceh BPS.
- _____.(2014). *Indikator Sosial Ekonomi Aceh 2013*. Aceh BPS.
- Caska dan RM. Riadi. (2008). *Pertumbuhan Dan Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antar Daerah Di Provinsi Riau*. Jurnal Industri dan Perkotaan Vol XII No 21 Hal. 1629-1642. <http://ejournal.unri.ac.id>. Diunduh 12 mei 2014
- Emilia dan Imelia. (2006). *Modul Ekonomi Regional*. Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Jambi. Jambi. <http://blog.umy.ac.id>. Diunduh 7 April 2014
- Kuncoro, Mudrajad. (2004). *Otonomi Dan Pembangunan Daerah Reformasi, Perencanaan, Strategi Dan Peluang*. Erlangga. Jakarta.

Sjafrizal. (2012). *Ekonomi Wilayah Dan
Perkotaan*. PT. Raja Grafindo

Persada. Padang - Sumatra Barat